

7 Kementerian Mengawasi Investor Peternakan: Pengawasan Terintegrasi terhadap Realisasi Investasi Bidang Peternakan

7 Ministries Overseeing Livestock Investors: Integrated Supervision of Livestock Investment Realization



Idha Susanti, S.Pt, M.M.

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pengawasan rutin terhadap investor telah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), akan tetapi mulai Tahun 2023 Kementerian Investasi/BKPM mengajak Kementerian terkait lainnya untuk melakukan pengawasan bersama. Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan investasi terutama investasi oleh investor asing.

Tujuan pelaksanaan pengawasan bersama antara lain adalah memberikan kenyamanan kepada investor supaya tidak didatangi oleh tim pemantauan dan monitoring berkali-kali karena jadwal antara kementerian yang berbeda-beda. Selain itu juga memberikan solusi bersama apabila ditemukan ada masalah yang harus dibahas bersama kementerian terkait lainnya, sehingga dapat dibahas secara bersama-sama dengan semua kementerian terkait.

Target pelaksanaan pengawasan Kementerian Investasi adalah pelaku usaha PMA di semua sektor yang menanamkan modal di Indonesia dan belum pernah dilakukan pengawasan atau pelaku usaha lama akan tetapi melakukan perluasan. Target lain yang ditetapkan dalam pengawasan bersama adalah evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang ada yang dituangkan dalam OSS. Aspek

Routine monitoring of investors has been carried out by the Investment Coordinating Board (BKPM), but starting from 2023, the Ministry of Investment/BKPM will invite other related ministries to conduct joint supervision. The supervision in question is monitoring and surveillance of investment implementation, especially foreign investment.

The objectives of joint supervision include providing convenience to investors so that they are not visited by monitoring teams multiple times due to different schedules of different ministries. In addition, joint solutions can be provided if problems are found that need to be discussed together with other relevant ministries, so that they can be discussed together with all relevant ministries.

The target of the Ministry of Investment's supervision is Foreign Investors in all sectors that invest in Indonesia and have not been monitored before, or existing business actors who are expanding. Another target set in joint supervision is the evaluation of business actors' compliance in carrying out their obligations in accordance with existing regulations contained in the OSS. Compliance aspects include fulfilling commitments and obligations according to the OSS application, which also includes fulfilling technical aspects.



kepatuhan tersebut antara lain meliputi pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai aplikasi OSS yang juga sebagian adalah pemenuhan aspek teknis.

■ Pelaksana Pengawasan Investasi Bidang Peternakan Terintegrasi

Pelaksana pengawasan bersama atau pengawasan terintegrasi kali ini terdiri dari Kementerian Investasi (BKPM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Dinas yang menangani fungsi peternakan provinsi lokasi farm berada, dan Dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten/kota lokasi farm berada. Akan tetapi pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan Kemendes sebagai leader ada beberapa kementerian tidak bisa ikut bergabung.

■ Realisasi Investasi peternakan

Realisasi investasi bidang peternakan baik PMDN maupun PMA masih rendah, seperti kita ketahui hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kurangnya informasi atau promosi investasi bidang peternakan. Meskipun demikian realisasi peternakan secara rata-rata terus mengalami kenaikan.

Realisasi investasi PMA subsektor peternakan mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata mengalami

Integrated Livestock Investment Supervision ■

This joint supervision or integrated supervision is carried out by the Ministry of Investment (BKPM), the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Ministry of Agrarian and Spatial Planning (ATR), the Ministry of Industry, the Ministry of Health, the Ministry of Manpower, the Ministry of Agriculture, the Provincial Livestock Function Office where the farm is located, and the District/City Livestock Function Office where the farm is located. However, on the scheduled day of implementation led by the Ministry of Investment, some ministries were unable to join.

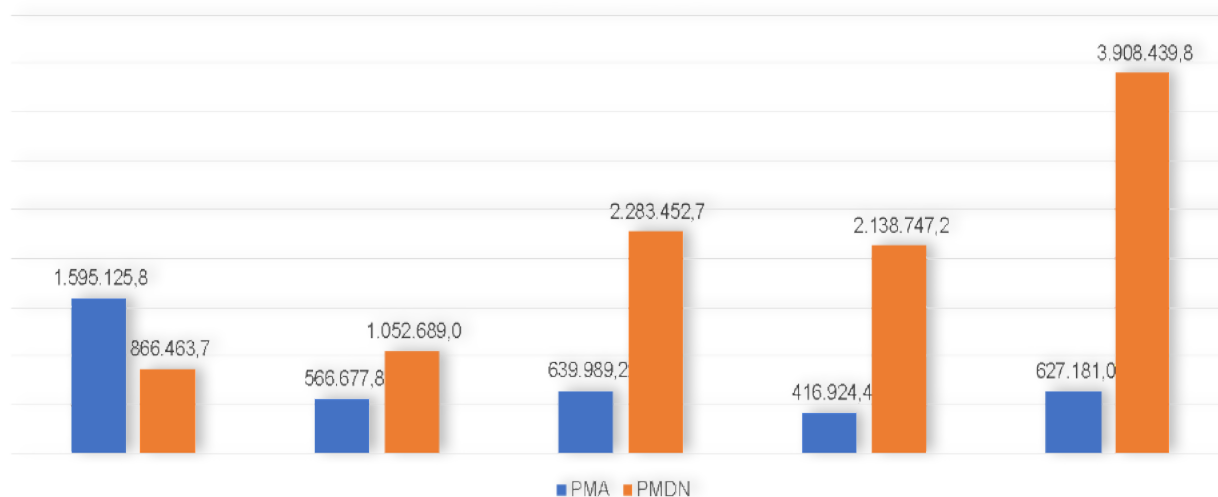
Livestock Investment Realization ■

The realization of both domestic and foreign livestock investments is still low, as we know this is influenced by many factors including lack of information or promotion of livestock investment. Nevertheless, the average realization of livestock investment continues to increase.

The realization of Foreign Investment (PMA) in the livestock subsector from 2018 to 2022 has decreased on average by 8.3%, due to a significant decrease in 2019 compared to 2018, which was 68.3%. However, from 2019 to 2022, it has increased on average by 11.6%.

Grafik Realisasi Investasi

(dalam Rp Juta)



Data s/d 31 Desember 2022 (Sumber : realisasi investasi BKPM diolah Ditjen PKH)

penurunan 8,3% karena terjadinya penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang sangat signifikan 68,3%, akan tetapi jika mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 11,6%.

Sementara untuk realisasi PMDN mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 53,7%, hal ini karena terjadi peningkatan realisasi yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 116,9% dibanding tahun 2018. Kondisi ini berbanding terbalik dibandingkan dengan dengan realisasi PMA yang turun signifikan.

Jika dirinci realisasi investasi per komoditi baik PMA maupun PMDN dikuasai oleh komoditas unggas seperti tergambar di tahun 2018 pada investasi PMA perunggasan mencapai 60% dari total realisasi investasi bidang peternakan sementara PMDN mencapai 75%. Demikian juga sampai dengan tahun 2022 realisasi investasi bidang peternakan masih di dominasi oleh komoditas unggas dimana realisasi PMA mencapai 80% dan PMDN 86%. Dari tabel diatas bahkan dicapai realisasi komoditas unggas mencapai 95% pada Tahun 2020 untuk PMDN dan PMA tercatat 92% untuk komoditas ini.

■ Pelaksanaan Pengawasan 2023

Di Awal pelaksanaan pengawasan terintegrasi ini,

Meanwhile, the realization of Domestic Investment (PMDN) from 2018 to 2022 has increased on average by 53.7%, as there was a significant increase in realization in 2019 by 116.9% compared to 2018. This condition is in contrast to the significant decrease in PMA realization.

If we break down the investment realization by commodity, both PMA and PMDN are dominated by poultry commodities as depicted in 2018 where PMA investment in poultry reached 60% of the total investment realization in the livestock sector, while PMDN reached 75%. Similarly, until 2022, investment realization in the livestock sector is still dominated by poultry commodities, where PMA realization reaches 80% and PMDN 86%. From the table above, even the realization of poultry commodities reached 95% in 2020 for PMDN, and PMA recorded 92% for this commodity.

2023 Monitoring Implementation ■

At the beginning of the implementation of this integrated supervision, the livestock sector started with a Greenfield company that focuses on dairy cattle commodities ranging from breeding and dairy cattle farming to fresh milk processing industries. The appointment of PT Greenfield as a pilot project for integrated supervision implementation is due

Rincian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Bidang Peternakan Tahun 2018-2022 (PMA dalam US\$ribu; PMDN dalam Rp Juta)										
Bidang Usaha	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Peternakan Sapi Dan Kerbau	47.551,6	123.929,4	9.855,1	174.724,8	3.468,2	109.863,4	19.388,7	228.930,0	5.877,9	424.174,3
Peternakan Babi	-	26.000,0	-	-	-	10.881,0	-	30.136,4	-	9.535,8
Peternakan Unggas	71.280,9	651.010,6	24.289,8	875.765,9	40.975,3	2.160.547,1	9.164,6	1.823.977,4	35.134,2	3.460.248,6
Peternakan Domba dan Kambing	3,7	-	1.900,4	2.198,6	-	2.146,2	3,4	979,3	296,2	3.481,7
Jasa Penunjang & Peternakan Lainnya	203,0	65.523,7	1.733,3	-	-	15,0	-	54.724,1	2.396,9	10.999,4
Total	119.039,3	866.463,7	37.778,6	1.052.689	44.443,5	2.283.452,7	28.556,7	2.138.747,2	43.705,3	3.908.439,8

Realisasi investasi per komoditas. *) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sumber : realisasi investasi BKPM diolah Ditjen PKH

untuk bidang peternakan diawali dengan perusahaan Greenfield yang bergerak di komoditas sapi perah mulai dari budidaya pembibitan dan budidaya sapi perah sampai dengan industri pengolahan susu segar. Penetapan PT Greenfield sebagai pilot project dari pelaksanaan pengawasan terintegrasi antara lain karena perusahaan ini merupakan pelaku usaha PMA dan sedang melakukan perluasan usaha di dua lokasi di luar Kabupaten Malang. Selain itu, saat ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat memerlukan adanya investor sapi perah karena alasan tingkat kebutuhan susu yang cukup tinggi akan tetapi produksi dalam negeri masih sangat sedikit. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ketergantungan impor terhadap susu dan bahan susu sangat tinggi, sebelum terjadinya wabah PMK mencapai 80% sehingga setelah wabah PMK dimana populasi dan produksi susu segar dalam negeri turun drastis mengakibatkan angka ketergantungan ini pun meningkat. Untuk itu Indonesia sangat memerlukan adanya investor di bidang sapi perah.

Pelaksanaan pengawasan dipimpin langsung oleh Kedepatian Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan hadir memimpin langsung pelaksanaan pengawasan terintegrasi yaitu Direktur Wilayah 1 dan Direktur Wilayah 4. Kementerian lain yang turut hadir yaitu perwakilan dari kementerian

to the fact that this company is a PMA business actor and is expanding its business in two locations outside of Malang Regency. In addition, the Directorate General of Livestock and Animal Health urgently needs dairy cattle investors due to the high demand for milk, but domestic production is still very low. As we know, the dependence on imported milk and dairy products is currently very high, reaching 80% before the outbreak of FMD, and after the FMD outbreak, the domestic population and production of fresh milk drastically decreased, resulting in an increase in this dependence rate. Therefore, Indonesia urgently needs investors in the dairy cattle sector.

The supervision is led directly by the Deputy for Control and Implementation of Investment and is attended by the Director of Region 1 and the Director of Region 4 who lead the integrated supervision directly. Other ministries that attend include representatives from the Ministry of Industry, the Ministry of Manpower, the Ministry of Health, and the Ministry of Agriculture. Representatives from the Center for Plant Variety Protection and Agricultural Licensing, the Directorate General of Livestock and Animal Health, and other officials from the relevant departments. Also the Investment and Integrated One-Stop Service Office (DPMPTSP) in district level and animal health and livestock management

Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Hadir dari Kementerian Pertanian Kepala Pusat PPVTPP beserta tim dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pembina pelaku usaha peternakan. Selain itu hadir juga dari DPMPSTSP daerah, dinas yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan hewan provinsi dan kabupaten.

Pengawasan diawali dengan opening meeting yang dipimpin oleh Direktur Wilayah 1 dan 4 dan seluruh tim dan dilanjutkan penilaian, pengawasan dan

departments are also present.

The supervision begins with an opening meeting led by the Director of Region 1 and 4 and the entire team, followed by assessments, supervision, and monitoring in the field. The aspects of supervision include:

1. *Ownership of business licenses for business activities (NIB/standard certificates/permits).*
2. *Compliance with the implementation of business activities standards.*
3. *Assessment of business activity*



Opening meeting pengawasan terintegrasi 7 Kementerian

monitoring di lapangan.

Aspek pengawasan meliputi:

1. Kepemilikan Perizinan berusaha atas kegiatan usaha (NIB/Sertifikat standar/Izin).
2. Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha.
3. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Usaha.
4. Riwayat penerapan Sanksi.

Keempat aspek tersebut dilakukan pengawasan dan penilaian baik secara langsung dan penilaian kelengkapan dokumen pendukung.

Catatan dari opening meeting antara lain adalah

implementation.

4. *History of imposition of sanctions.*

The four aspects are subject to direct supervision and assessment, as well as assessment of supporting document completeness.

Notes from the opening meeting include that the integrated supervision for PMDN business actors is conducted by the local DPMPSTSP together with the provincial and district livestock and animal health departments as mentors at the location of the farm. The departments must start recording the realization of PMDN investments that currently exist, so that mentoring, monitoring, and supervision can be carried out promptly. This is necessary

untuk pelaksanaan pengawasan terintegrasi bagi pelaku usaha PMDN dilakukan oleh DPMPSTSP daerah bersama dengan dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten pembina pada lokasi farm berada. Dinas harus mulai mendata realisasi investasi PMDN yang saat ini sudah ada sehingga dapat segera dilakukan pendampingan, monitoring dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan investasi memberikan dampak positif dan nilai manfaat baik untuk investor maupun masyarakat di sekitar farm berada.

Kewenangan Kementerian Pertanian ada pada aspek no 1 dan nomor 2, dimana no 2 merupakan penilaian mulai dari persyaratan umum, khusus, sarana usaha, organisasi dan SDM, pelayanan usaha, standar produk barang/jasa dan sistem manajemen usaha.

Hasil pengawasan terintegrasi di pada PT Greenfield antara lain adalah belum adanya sertifikat Good Breeding Practices (GBP)/ Good Farming Practices (GFP) dan pelaksanaan kemitraan yang belum melibatkan dinas kabupaten sebagai pembina peternak. Hal ini menjadi pekerjaan rumah baru untuk dinas yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten untuk melakukan penilaian dalam proses GBP dan GFP serta pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan kemitraan.(is)

to ensure that investment implementation has a positive impact and benefits both investors and the surrounding communities.

The authority of the Ministry of Agriculture is in aspects number 1 and number 2, where number 2 is the assessment starting from general requirements, special requirements, business facilities, organization and human resources, business services, product standards for goods/ services, and business management systems.

The results of the integrated supervision at PT Greenfield include the absence of Good Breeding Practices (GBP)/ Good Farming Practices (GFP) certification and the implementation of partnerships that do not involve the district department as the mentor of farmers. This is a new task for the department that handles animal husbandry and animal health functions in the district to assess the GBP and GFP processes, as well as provide guidance and monitoring in the implementation of partnerships(is/tr-rwg)



Pengawasan terpadu di lapangan